

CEGAH BOBOL INDUSTRI PELOPOR

Industri pionir di persimpangan. Fasilitas diskon pajak penghasilan korporasi berbentuk tax *holiday* yang tersaji sejak berpuluhan-warsa silam, terancam tak lagi tersedia lantaran pemangku kebijakan hingga kini belum memberikan kepastian.

Maria Elena & Aziz Rahardyan
redaksi@bisnis.com

BISNIS Fokus

CAKUPAN INDUSTRI PIONIR

Industri logam dasar bahan (besi
baja/bukan besi baja) tanpa/
berserta turunannya yang terintegrasi

1

Industri pemurnian/pengilangan
minyak dan gas bumi tanpa/
berserta turunannya yang terintegrasi

2

Industri kimia dasar organik
yang bersumber dari minyak bumi,
gas alam, dan/atau batu bara tanpa/
berserta turunannya yang terintegrasi

3

Industri kimia dasar organik yang
bersumber dari hasil pertanian,
perkebunan, atau kehutanan tanpa/
berserta turunannya yang terintegrasi

4

Industri kimia dasar anorganik
tanpa/berserta turunannya yang
terintegrasi

5

Industri bahan baku utama
farmasi tanpa/berserta turunannya
yang terintegrasi

6

Industri pembuatan peralatan
iradiasi, elektromedikal, atau
elektroterapi

7

Industri pembuatan komponen
utama peralatan elektronika atau
telekomunikasi, seperti semiconductor
wafer, kecildip untuk Liquid Crystal
Display (LCD), electrical driver, atau display

8

Industri pembuatan mesin
dan komponen utama mesin

9

Industri pembuatan komponen
robotik yang mendukung industri
pembuatan mesin-mesin manufaktur

10

Industri pembuatan komponen
utama mesin pembangkit tenaga
listrik

11

Industri pembuatan kendaraan
bermotor dan komponen

12

Industri pembuatan komponen
utama kapal

13

Industri pembuatan komponen
utama kereta api

14

Industri pembuatan komponen
utama pesawat terbang dan aktivitas
penunjang industri dirgantara

15

Industri pengolahan berbasis
hasil pertanian, perkebunan, atau
kehutanan yang menghasilkan bahan
keras (pulp) tanpa/berserta turunannya

16

Infrastruktur ekonomi

17

Ekonomi digital yang
mencakup aktivitas pengolahan
data, hosting, dan kegiatan yang
berhubungan dengan itu

18

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, payung hukum tax *holiday* industri pionir, berakhir pada pekan ini, tepatnya 8 Oktober 2024.

Dengan demikian, per 9 Oktober 2024 pelaku industri pionir tak lagi bisa mengajukan pemanfaatan diskon jumbo Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Persoalannya, hingga saat ini pemerintah belum memberikan sinyal perpanjangan fasilitas yang sejatinya amat krusial itu.

Faktanya, industri pionir merupakan salah satu soko guru manufaktur dalam menjawab tantangan deindustrialisasi.

Industri pionir, adalah aktivitas manufaktur yang memiliki keterkaitan luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian.

Mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 7/2020 tentang Rincian Badan Usaha dan Jenis Produksi Industri Pionir serta Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, ada 18 bidang usaha pionir yang bisa memanfaatkan tax *holiday*. (Lihat infografik).

Bukannya tanpa alas-an pemerintah masih mengantung masa depan tax *holiday* industri pionir. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis dari orang dekat otoritas fiskal, ada dua alar-

ini, pemerintah pun lagi-lagi terpecah.

Kementerian Perindustrian dan BKPM meminta adanya pelonggaran, sedangkan Kementerian Keuangan mengusulkan pengetatan untuk menjaga efektivitas insentif.

Saat dihubungi Bisnis, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, menyampaikan keberlanjutan pemberian fasilitas diskon PPh Badan industri pionir masih dalam pembahasan lintas kementerian dan lembaga (KL) terkait.

"Saat ini sedang dilakukan pembahasan bersama KL terkait."

Akan tetapi, dia tidak menjelaskan secara terperinci mengenai rencana perubahan dalam skema tersebut.

NONFISKAL

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memberikan perhatian utama untuk menarik investasi industri pionir ke dalam negeri, baik melalui insentif fiskal maupun nonfiskal.

Menurutnya, upaya itu perlu dilakukan mengingat banyak negara yang berlomba-lomba mengejar

karpet merah untuk menarik manufaktur pelopor.

Tidak hanya menyediakan insentif, sejumlah negara bahkan turut memperpanjang modal yang besar untuk korporasi swasta agar bersedia membenamkan investasi industri pionir.

"Indonesia tidak chip in di capital, sehingga kita hanya bisa memberikan tax *holiday* atau

tax incentive, kemudahan, dan sebagainya. Negara lain lebih agresif," katanya.

Komitmen pemerintah untuk mendukung eksistensi industri pionir tak perlu diragukan.

Hanya saja, sejauh ini masih belum ada penegasan soal masa depan tax *holiday* khusus industri pelopor.

Kalangan pelaku industri pun mendesak pemerintah untuk terus membuka keran stimulus. Alih-alih mendesain ulang tax *holiday*, pebisnis justru berharap stimulus yang dikucurkan lebih keras.

Ketua Umum Asosiasi

GRATIS

tax *holiday* turut memperpanjang tersebut.

Pertama, benturan tax *holiday* dengan konsensus internasional mengenai pajak minimum global atau *global minimum tax*, yang mewajibkan seluruh yurisdiksi untuk tidak mengabaikan diskon PPh Badan.

Dalam konteks ini, terjadi perbedaan pendapat antara Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian Perindustrian yang pro insentif, dengan Kementerian Keuangan yang menolak adanya perpanjangan tax *holiday* lantaran berseberangan dengan konsensus global.

Kedua, perdebatan soal desain ulang skema serta cukupan industri pionir yang berhak menerima fasilitas tersebut. Soal

Belum adanya kepastian mengenai perpanjangan insentif tax *holiday* untuk industri pionir memicu kecemasan di kalangan dunia usaha dan menghambat upaya reindustrialisasi.

Diantaranya batas minimal investasi, jumlah tenaga kerja, dan kewajiban penerima yang harus perusahaan bawa.

"Syaratnya masih berat," keluhnya.

Sekretaris Jenderal Cabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman, menekankan bahwa upaya mengembangkan industri komponen elektronik tak bisa hanya

mengandalkan insentif

perpajakan.

Menurut Daniel, pemerintah perlu memiliki pola pikir teguh untuk memperkuat industri produk jadi elektronika, lantas mengembangkan industri komponen yang sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan bahan baku dari dalam negeri.

Merespons keluhan pelaku industri itu, Kementerian Perindustrian berjanji untuk menyampaikan masukan tersebut kepada otoritas fiskal.

Direjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, mengatakan instansi tersebut berprinsip masih berlunya insentif fiskal seperti diskon pajak korporasi hingga 100% tetapi berlanjut, sebagaimana pandangan Kementerian Investasi/BKPM.

Menurutnya, pemerintah sedang mengupayakan keberlanjutan perlakuan fiskal yang mengacu kepada peraturan yang kadaluwarsa pada 8 Oktober 2024 itu.

"Kami akan coba agar bagaimana aturan itu tetap berjalan demi mendorong keberlangsungan investasi," kata Putu.

Sementara itu, kalangan ekonomi menyayangkan apabila pemerintah tidak memperpanjang skema tax *holiday* tersebut. Pasalnya, hal itu kontraproduktif dengan misi pemangku kebijakan yang tengah mendorong penghilangan.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menilai PMK No. 130/2020 semestinya diperpanjang untuk mendorong hadirnya industri baru.

Andy menilai kebijakan insentif mutlak dibutuhkan bagi industri

pionir. Sebab dalam jangka panjang investasi itu akan menghadirkan teknologi baru sehingga manufaktur nasional makin berberdaya daya saing.

"Konsepnya mengisi pohon industri, tidak hanya insentif fiskal juga nonfiskal. Negara memang masih perlu hadir dalam bentuk pemberian insentif fiskal untuk menarik investor," ujarnya.

(Rahmad Fauzan/Anitana W. Puspita)

Data Perbandingan
PMK Manufaktur
Negara-negara
Asia pada
Agustus 2024 dan
September 2024



Belum adanya kepastian mengenai perpanjangan insentif tax *holiday* untuk industri pionir memicu kecemasan di kalangan dunia usaha dan menghambat upaya reindustrialisasi.

Di antaranya batas minimal investasi, jumlah tenaga kerja, dan kewajiban penerima yang harus perusahaan bawa.

"Syaratnya masih berat," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Cabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) Daniel Suhardiman, menekankan bahwa upaya mengembangkan industri komponen elektronik tak bisa hanya

mengandalkan insentif

perpajakan.

Menurut Daniel, pemerintah perlu memiliki pola pikir teguh untuk memperkuat industri produk jadi elektronika, lantas mengembangkan industri komponen yang sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan bahan baku dari dalam negeri.

Merespons keluhan pelaku industri itu, Kementerian Perindustrian berjanji untuk menyampaikan masukan tersebut kepada otoritas fiskal.

Direjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika, mengatakan instansi tersebut berprinsip masih berlunya insentif fiskal seperti diskon pajak korporasi hingga 100% tetapi berlanjut, sebagaimana pandangan Kementerian Investasi/BKPM.

Menurutnya, pemerintah sedang mengupayakan keberlanjutan perlakuan fiskal yang mengacu kepada peraturan yang kadaluwarsa pada 8 Oktober 2024 itu.

"Kami akan coba agar bagaimana aturan itu tetap berjalan demi mendorong keberlangsungan investasi," kata Putu.

Sementara itu, kalangan ekonomi menyayangkan apabila pemerintah tidak memperpanjang skema tax *holiday* tersebut. Pasalnya, hal itu kontraproduktif dengan misi pemangku kebijakan yang tengah mendorong penghilangan.

Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menilai PMK No. 130/2020 semestinya diperpanjang untuk mendorong hadirnya industri baru.

Andy menilai kebijakan insentif mutlak dibutuhkan bagi industri

Kontribusi Industri
Pengolahan ke PDB



2023

Besaran Insentif Industri Pionir

Diskon PPh	Syarat Investasi
100% dari PPh	Terutang Minimal Rp500 Miliar
50% dari PPh	Terutang Rp100 Miliar-Rp500 Miliar

Durasi Insentif Tax Holiday

Jangka Waktu	Penanaman Modal
5 Tahun Pajak	Rp500 Miliar sampai kurang dari Rp1 Triliun
7 Tahun Pajak	Rp1 Triliun sampai kurang dari Rp5 Triliun
10 Tahun Pajak	Rp5 Triliun sampai kurang dari Rp15 Triliun
15 Tahun Pajak	Rp15 Triliun sampai kurang dari Rp30 Triliun
20 Tahun Pajak	Minimal Rp30 Triliun

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 130/2020, Peraturan BKPM No. 7/2020, Badan Pusat Statistik

</